

**PENGARUH FAKTOR – FAKTOR AUDIT INTERNAL,
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN BUDAYA ORGANISASI
TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN BUMN PEKANBARU)**

Yolanda Safitri Nelaz, H. Amir Hasan, Enni Savitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah faktor-faktor audit internal, pengendalian internal, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan good corporate governance. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan BUMN di Pekanbaru. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 87 responden. Sebanyak 75 kuesioner diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan SPSS 21.0 dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor audit internal, budaya organisasi berpengaruh terhadap good corporate governance sementara pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap good corporate governance. Nilai signifikan masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah 0,005 untuk independensi, 0,002 untuk kemampuan profesional, 0,000 untuk lingkup pekerjaan, 0,011 untuk pemeriksaan kegiatan pemeriksaan, 0,173 untuk pengendalian internal, 0,000 untuk budaya organisasi

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Faktor-Faktor Audit Internal, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi.*

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu system dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan/guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. (Moh. Wahyudin Zarkasyi 2008:36)

Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Implementasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah (BUMN) mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga perusahaan tersebut lebih diminati investor dan dapat meningkatkan nilai sahamnya. Selain itu, implementasi *Good Corporate Governance* di perusahaan atas maupun perusahaan pemerintah (BUMN) dapat membuat akses sumber modal yang mudah dan murah, disamping memiliki risiko yang terkendali (Effendi, 2010).

Peran audit Internal pada BUMN sangat diperlukan dalam membantu manajemen menjalankan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien. Fungsi audit internal pada BUMN diatur berdasarkan Undang- Undang RI No 19 Tahun 2003 mengenai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pasal 67 yang menyebutkan bahwa pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan. (Mulyadi, 2013). Audit internal merupakan salah satu unsur Dan pelaksanaan *good corporate governance* seperti yang diungkap oleh Tjaker Dec [15]. Fungsi audit internal meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan efektifitas dikaitkan dengan rencana strategis perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan unsur yang sangat penting dalam penerapan *good corporate governance*. Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M/MBU/2002 Pasal 22 yang disebutkan bahwa direksi harus menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMN.

Sistem pengendalian Internal yang efektif dapat menjamin operasi perusahaan yang efektif dan efisien serta dipatuhinya aturan – aturan internal perusahaan dan aturan dari luar yang terkait dengan perusahaan sehingga dapat tercipta akuntabilitas. Perekonomian yang dimiliki Indonesia merupakan ekonomi berbasis pasar, dimana pemerintah memiliki peranan terpenting. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan sistem yang berdasarkan dari aturan- aturan, aspek dan mekanisme yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya sebagai pengalokasian sumber daya milik Negara kepada seluruh masyarakat dengan adil dan merata.

Namun dalam implementasinya tujuan tersebut masih belum terealisasi dengan baik. Hal inilah yang menjadi penyebab munculnya berbagai masalah termasuk krisis dalam ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini disebabkan karena timbulnya oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sulitnya menjalankan penegakan hukum, monopoli dalam kegiatan perekonomian serta pelayanan terhadap publik yang kualitasnya memburuk. Fakta yang terlihat sebagai bukti lemahnya penerapan *Good Governance* adalah terjadinya kasus korupsi yang terbilang tinggi. Masalah – masalah inilah yang menyebabkan terhambatnya proses perekonomian yang baik di Indonesia, sehingga semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dan semakin banyak juga jumlah penduduk yang miskin. (Maradiasmo,2007:17) menyatakan bahwa governance dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan dalam mengelola urusan – urusan public.

Menurut *Unites National Development Program* (UNDP) terdapat prinsip – prinsip good governance, yakni : partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientaritas pada consensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, dan perekonomian secara keseluruhan. Terdapat beberapa asa dalam penerapannya yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indepedensi, Kewajaran dan Kesetaraan. Kelima asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*). *IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance)*, mendefinisikan konsep *Corporate Governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

IICG mendefinisikan pengertian mengenai *Corporate Governance* yang baik sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Isu mengenai *Corporate Governance* (CG) menjadi kembali menarik setelah beberapa perusahaan besar dan bonafit yang berbasis di Amerika Serikat seperti Goldman Sachs, Bear Stern, Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan Lehman Brothers, satu persatu tumbang. Di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun1997, masalah mengenai *Good Corporate Governance* mulai mengemuka. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan reformasi akan perubahan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara.

Reformasi BUMN di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, yang merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian BUMN untuk memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* di setiap BUMN agar dapat bersaing dalam dunia bisnis yang semakin berkembang. Selain itu, krisis ekonomi juga telah membawa dampak yaitu munculnya isu mengenai *Good Corporate Governance* yang menjadi isu sentral dalam rangka mendukung pemilihan ekonomi dan pertumbuhan bisnis di pasaran, *Good Corporate Governance* sendiri merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun di tinjau dari nilai – nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri, (Hidayah,2008).

Oleh karena itu jika kondisi *Good Corporate Governance* dapat dicapai maka akan terwujud Negara yang bersih dan responsive yaitu Negara yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan meningkatkan laba perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti kreditur, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

Good Corporate Governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota *the stakeholders* non pemegang saham. *Corporate governance* sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh *board of directors*) dengan pemegang saham dan juga mengatur hubungan dan pertanggungjawaban/ akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota *the stakeholders* non pemegang saham (Siswanto,2005)

Menurut forum *Corporate Governance* Indonesia (FCGI) I Nyoman (2003) menyatakan, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambahan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Auditor internal merupakan bagian dari kegiatan suatu perusahaan yang integral dan berfungsi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Perannya yang sangat besar dalam perusahaan akan memberikan kontribusi bagi pihak manajemen dan auditor ekstern. Kegiatan audit internal meliputi pengujian dan penilaian efektivitas dan kecukupan system pengendalian interna yang ada dalam perusahaan. Tanpa fungsi audit internal, dewan direksi, manajemen puncak lainnya dan auditor ekstern tidak memiliki sumber Informasi internal yang dapat diandalkan mengenai kinerja perusahaan. (Tugiman, 2006).

Dalam menjalankan tugasnya auditor harus bertindak independen berdasarkan pada standar dan peraturan yang berlaku serta standar moral yang diterima secara luas (Moeller, 2004). Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para auditor internal. Status organisasi dan sikap objektif dari para auditor internal. Status organisasi unit audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi auditor internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal.

Audit internal harus memperoleh dukungan moral secara penuh dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian pemeriksaan. Koordinasi yang teratur antara pimpinan audit internal dengan dewan direksi dan komite audit akan membantu terjaminnya kemandirian dan juga merupakan sarana bagi semua pihak untuk dapat saling memberikan informasi demi kepentingan organisasi secara keseluruhan kehadiran pimpinan audit internal dalam rapat dewan akan melengkapi pertukaran informasi berkaitan dengan rencana dan kegiatan audit internal. Pimpinan audit internal harus bertemu langsung dengan dewan secara periodik, paling tidak setiap tiga bulan sekali. Dalam menjalankan tujuannya auditor harus bertindak independen berdasarkan pada standar dan peraturan yang berlaku serta standar moral yang diterima secara luas. Independensi merupakan perilaku pengambilan keputusan yang selalu dihadapi oleh auditor. Masalah independensi sering muncul bila terjadi konflik antara pihak manajemen dengan auditor.

Untuk dapat melakukan tugasnya sebagaimana yang diharapkan dan memenuhi syarat profesionalisme, maka audit internal harus dari tenaga – tenaga yang kompeten, mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis audit dengan standar yang tinggi, memiliki daya imajinasi serta berinisiatif, dan mampu berhubungan dengan bagian lainnya dalam organisasi perusahaan tersebut. (Gusnardi, 2006). Adapun faktor – faktor yang mendukung kemampuan profesional diantaranya :

Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang – orang yang secara bersama – sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistic, pemrosesan data elektronik, perpajakan dan hukum, yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Pimpinan audit internal harus dapat memberikan jaminan atau kepastian bahwa secara teknis latar belakang pendidikan dari para pemeriksa internal telah sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan (Gusnardi, 2006).

Pimpinan internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang akan dilakukan sifatnya berkelanjutan yang dimulai dengan perencanaan dan di akhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup :

- Memberikan instruksi – instruksi kepada para staff audit internal pada awal pemeriksaan dan menyetujui program pemeriksaan
- Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan, kecuali bila terdapat penyimpangan yang dibenarkan atau disahkan
- Menentukan apakah kertas kerja pemeriksaan telah cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan – kesimpulan, dan laporan hasil pemeriksaan
- Menyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu
- Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai.

Untuk dapat melakukan tugasnya sebagaimana yang diharapkan memenuhi syarat profesionalisme, maka audit intern harus terdiri dari tenaga–tenaga yang kompeten mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis audit dengan standar yang tinggi, memiliki daya imajinasi sera berinisiatif, dan mampu berhubungan dengan bagian lainnya dalam organisasi perusahaan tersebut. (Tugiman,2006).

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan system pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan keefektifan suatu system pengendalian internal adalah untuk menentukan apakah system yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien dan ekonomis, serta untuk memastikan apakah system tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. (Febry Romadhan, 2017). Sistem informasi akan menyediakan data yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Karena auditor internal haruslah menguji system Informasi tersebut, dan menentukan apakah berbagai catatn, laporan financial, dan laporan operasional perusahaan mengandung Informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap dan berguna. Management bertanggung jawab untuk menetapkan system, yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang – undangan. Auditor internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah system tersebut telah cukup efektif dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Auditor internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, dan kegiatan yang illegal. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aktiva, auditor internal harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan standar operasional yang dipergunakan untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk :

- Telah ditetapkan standar operasional untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi
- Standar operasional tersebut telah dipahami dan dipenuhi
- Berbagai penyimpangan dari standar profesional telah diidentifikasi, dianalisis, dan diberitahukan kepada berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan
- Tindakan perbaikan yang telah dilakukan

Dalam hal ini auditor internal harus memberikan kepastian sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan apakah sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. (Wardoyo, 2010).

Tahap awal dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan adalah perencanaan atau membuat program audit internal. Program tersebut akan menjadi pedoman bagi auditor dalam melaksanakan kegiatan audit. (Arens, et al, 2008). Audit internal harus melakukan perencanaan pemeriksaan terlebih dahulu yang meliputi :

- Penetapan tujuan pemeriksaan dan ruang lingkup pekerjaan
- Memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa
- Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan
- Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
- Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau area yang diperiksa
- Penetapan program pemeriksaan
- Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan
- Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan

Dalam tahap perencanaan pemeriksaan, haruslah dilakukan rapat dengan manajemen yang bertanggung jawab terhadap bidang yang akan diperiksa. Hal – hal yang didiskusikan antara lain mencakup berbagai tujuan dan lingkup kerja pemeriksaan yang direncanakan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, staf audit yang akan ditugaskan, hal – hal yang menjadi perhatian audit internal. Audit internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran Informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. Informasi haruslah mencakupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.

Auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, singkat, jelas, dan tepat waktu. Laporan yang objektif adalah laporan yang factual, tidak berpihak, dan terbebas dari distorsi. Laporan yang jelas dan mudah dimengerti. laporan yang diringkas adalah laporan yang langsung membicarakan pokok permasalahan dan menghindari berbagai rincian yang tidak diperlukan. Laporan yang konstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak yang diperiksa dan organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang diperlukan. Auditor internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut auditor internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan ketepatan dan keefektifan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

Adapun manfaat dari program audit internal menurut Sawyer dalam PPA STAN (1996) adalah sebagai berikut :

- Sebagai penuntun
- Sebagai dasar untuk penyusunan anggaran
- Sebagai alat untuk memperoleh partisipasi manajemen
- Sebagai alat pengendalian
- Sebagai pedoman bagi pemeriksaan eksternal

Dengan demikian program audit dapat digunakan sebagai panduan bagi tim auditor, sebagai bukti kegiatan yang telah dilakukan dan sebagai dasar penyusunan rencana audit pada tahun berikutnya. Program audit menggambarkan kegiatan yang dilakukan sebagai bahan untuk membuat rekomendasi dari temuan – temuan hasil audit (Tugiman, 2006). Pengendalian Intern menurut Arens dan Loebecke (2008) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja pemerintahan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Dalam lingkungan pemerintahan pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan, dan manajemen secara keseluruhan yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan akan tercapainya tujuan pemerintahan.

Pengendalian intern ditetapkan setelah mempertimbangkan pengaruh lingkungan secara menyeluruh yang dilakukan bersama – sama dengan penilaian yang memadai terhadap resiko yang relevan serta mekanisme pemantauan yang efektif. Pengendalian intern yang efektif dapat memberikan keyakinan tersedianya pelaporan keuangan yang handal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dari pelaporan keuangan yang handal tersebut manajer dapat memperkirakan dan mengambil keputusan tindakan apa yang harus dilakukan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan. Untuk menciptakan pengendalian intern yang efektif maka elemen – elemen pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko. Prosedur pengendalian, pemantauan informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan pula dan di evaluasi apakah sudah berjalan dengan baik. **(Murtanto, 2005)**. Budaya organisasi dapat mempengaruhi karyawan dalam bertindak, cara menggambarkan pekerjaan, dan cara bekerja dengan karyawan lain.

Dalam setiap organisasi, budaya organisasi selalu diharapkan baik karena baiknya budaya organisasi akan berhubungan dengan berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Budaya organisasi yang positif akan memacu organisasi ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, budaya organisasi yang negatif akan memberi dampak yang negatif bagi organisasi. Oleh sebab itu, apabila budaya organisasinya baik maka penerapan GCG dalam organisasi juga baik. Sedangkan secara umum, perusahaan atau organisasi terdiri atas sejumlah orang dengan latar belakang, kepribadian, emosi, dan ego yang beragam. Secara sederhana, budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai kesatuan orang-orang yang memiliki tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai yang sama.

Pengaruh Independensi terhadap *Good Corporate Governance*

Menurut Mulyadi (2013) independensi adalah sebagai suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung orang lain. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sikap independen adalah sikap yang ditunjukkan seseorang tanpa memihak pada pihak tertentu mampu mengambil keputusan tanpa tergantung pada pengaruh orang lain. Auditor yang memiliki sikap independen tidak akan mudah dipengaruhi pihak – pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap audit yang sedang dilaksanakannya.

Pengaruh Kemampuan Profesional terhadap *Good Corporate Governance*

Kemampuan profesional merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Staf audit internal yang profesional memiliki pengetahuan yang cukup dan akan melaksanakan tugas dengan kehati – hatian profesional sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang baik. Dengan pengetahuan yang dimilikinya audit internal juga dapat menilai apakah perusahaan telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengaruh Ruang Lingkup Pekerjaan terhadap *Good Corporate Governance*

Lingkup pekerjaan audit internal adalah menilai efektivitas system pengendalian internal. Achmad Daniri (2005) menyebutkan bahwa system pengendalian internal mencakup berbagai kebijakan, prosedur, kegiatan, pemantauan dan komunikasi, dan standar perilaku serta berbagai inisiatif yang ditujukan untuk :1) mengamankan asset, 2) mengupayakan efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan 3) mengembangkan keandalan dan kelengkapan Informasi akuntansi/finansial dan manajemen 4) menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta perundang – undangan yang berlaku.

Pentingnya sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan *good corporate governance* disebutkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 22 yang menyebutkan bahwa dalam penerapan praktek *good corporate governance* maka direksi harus menetapkan suatu system pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMN.

Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan terhadap *Good Corporate Governanance*

Variabel pelaksanaan kegiatan pemeriksaan cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat mempengaruhi prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, dan prinsip kewajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan setiap temuan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan kriteria dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan dilaporkan kepada manajemen dan direkomendasikan untuk diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh manajemen tersebut akan meningkatkan kualitas perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan prinsip – prinsip *good corporate governance*.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governanance*

Pengendalian internal ditetapkan setelah mempertimbangkan pengaruh lingkungan secara menyeluruh yang dilakukan bersama-sama dengan penilaian yang memadai terhadap resiko yang relevan serta mekanisme pemantauan yang efektif. Pengendalian intern yang efektif dapat memberikan keyakinan tersedianya pelaporan keuangan yang handal tersebut manajer dapat memperkirakan dan mengambil keputusan tindakan apa yang harus dilakukan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan. Untuk menciptakan pengendalian intern yang efektif maka elemen pengendalian-pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan serta Informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan pula dan di evaluasi apakah sudah berjalan dengan baik.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap *Good Corporate Governanance*

Menurut Sentot Imam (2010) bahwa budaya organisasi mengacu pada kesatuan system makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi – organisasi lain. Budaya perusahaan yang baik adalah budaya yang sesuai dengan sistem nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi, dipelajari, ditetapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

Budaya yang kuat adalah budaya yang mampu mengikat seluruh anggota organisasi, menjadi sistem perekat, menjadi milik bersama. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini diduga bahwa Independensi (X1), Kemampuan Profesional (X2), Lingkup Pekerjaan (X3), Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan (X4), dari para auditor di BUMN Kota Pekanbaru memberikan pengaruh pada *Good Corporate Governance* (Y) yang diberikan. Selain itu diduga pula bahwa Pengendalian Internal (X5), dan Budaya Organisasi (X6) dapat memberi pengaruh positif terhadap hubungan antara Independensi, Kemampuan Profesional, Lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan dengan *Good Corporate Governance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan analisis data mengenai Pengaruh Faktor – Faktor Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUMN di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Independensi berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Semakin baik independensi yang dimiliki auditor maka akan semakin baik pula pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
2. Kemampuan profesional berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki auditor dalam melaksanakan tugas dengan kehati-hatian profesional sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang baik maka semakin baik pula pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
3. Lingkup pekerjaan berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Lingkup pekerjaan meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi. Semakin baik lingkup pekerjaan semakin baik pula pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Semakin baik pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan maka semakin baik pula pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
5. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang seharusnya saling mengawasi justru bekerjasama menutupi kesalahan yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga pengendalian internal tidak berfungsi dengan baik.

6. Budaya organisasi berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Semakin baik budaya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin baik pula pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini terbatas pada :

1. Objek penelitian ini terbatas pada Kota Pekanbaru dan hanya meneliti *good corporate governance* di perusahaan BUMN di Pekanbaru saja.
2. Variabel penelitian terbatas pada independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengendalian internal, budaya organisasi dan *god corporate governance*.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat diberikan saran-saran yang merupakan sumbangan dari hasil penelitian ini :

A. Bagi Perusahaan Tempat Penelitian

1. Agar dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor audit internal yang terdiri dari independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengendalian internal, dan budaya organisasi sehingga manfaat pelaksanaannya menjadi lebih optimal.
2. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan fungsi audit internal yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan *good corporate governance*.
3. Agar direktur bersikap mendukung peningkatan kompetensi auditor internal dengan cara mengintruksikan auditor internal mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang berkaitan dengan bidang audit intern

B. Bagi perusahaan-perusahaan lainnya secara umum belum melaksanakan audit internal secara optimal disarankan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan audit internal

C. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Misalnya variabel dan kepemimpinan terhadap *good corporate governance*. komite audit, komitmen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance pendekatan terintegrasi jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

- Hidayah, Erna. 2008. *Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan Bursa Efek Jakarta*. JAAI Vol. 12 No 1 : 53-64.
- Hiro Tugiman. 2006. *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maradiasmo, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moeller, R. R. (2008). *Sarbanes-Oxley Internal Controls: Effective Auditing with AS5, CobiT, and ITIL*. John Wiley and sons, Inc. New Jersey.
- Mulyadi, 2013. *Auditing, Edisi 6. Salemba Empat, Buku 1. Jakarta*
- Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.